

Pendampingan Penyusunan Harga Pokok Penjualan (HPP) guna Meningkatkan Profitabilitas dan Persaingan Pasar pada UMKM Desa Pandau Jaya

Nisa Alqorni¹, Nadia Triwahyuni², Desiyanti Rifayani³, Nuraini⁴, Rinto Rahmad⁵, Gazian Hazazi Nubli⁶

Institut Az Zuhra

**Corresponding author*

E-mail: nisaalqornii@gmail.com*

Article History:

Received: 15 Mei 2026

Revised: 18 Mei 2026

Accepted: 26 Mei 2026

Abstract: *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in the national economy, but often face challenges in financial recording, particularly in determining the Cost of Goods Sold (COGS). This community service program aims to improve the understanding and skills of MSMEs in Pandau Jaya Village, Siak Hulu District, in accurately preparing COGS to boost profitability and market competitiveness. The implementation methods used were educational outreach, material presentations, independent calculation simulations, and interactive discussion sessions. The results of the community service program showed an increase in participants' awareness and technical skills in identifying production cost components (raw material costs, direct labor, and factory overhead). Through this mentoring, business owners successfully shifted their paradigm from intuition-based price estimation to calculations based on formal accounting data. The sustainability of this program is expected to strengthen MSMEs' internal financial management for healthy business growth.*

Keywords:

Cost of Goods Sold, Profitability, MSMEs, Pandau Jaya Village

Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan pilar krusial bagi aktivitas ekonomi masyarakat skala kecil yang memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan dinamika pasar saat ini, sektor UMKM terbukti mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sekaligus menjadi katup penyelamat perekonomian di tingkat akar rumput. Konteks ini dipertegas oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 yang mendefinisikan UMKM sebagai sebuah rumpun usaha dalam bidang ekonomi yang bersifat produktif. Sebagai entitas bisnis yang mandiri, UMKM dapat didirikan baik oleh perorangan maupun perusahaan atau badan usaha yang bergerak secara dinamis di berbagai

sektor industri.

Kendati memiliki kontribusi yang masif, keberadaan UMKM di Indonesia sering kali dibayangi oleh berbagai keterbatasan internal, terutama dalam aspek tata laksana administrasi dan manajemen keuangan. Kondisi obyektif di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha mikro masih mengelola roda bisnis mereka secara tradisional. Fenomena yang jamak ditemui adalah minimnya pemisahan antara aset pribadi pemilik dengan modal operasional perusahaan, serta tidak adanya standarisasi pembukuan akuntansi yang dapat diandalkan. Bias manajerial ini membuat para pelaku usaha sulit untuk mengevaluasi kinerja keuangan mereka secara objektif, yang pada akhirnya membatasi peluang mereka untuk berkembang ke skala bisnis yang lebih besar.

Fokus utama yang menjadi isu sentral dalam program pengabdian kepada masyarakat ini adalah ketidakmampuan para pelaku usaha lokal dalam mengalkulasi dan menyusun Harga Pokok Penjualan (HPP). Secara teoretis, Harga Pokok Penjualan (HPP) diartikan sebagai total biaya langsung yang dikeluarkan oleh sebuah entitas usaha dalam rangka memproduksi barang atau jasa yang akan dijual pada periode akuntansi tertentu. Total pengeluaran ini mencakup akumulasi dari seluruh biaya produksi inti, seperti biaya perolehan bahan baku, upah tenaga kerja yang terlibat langsung, hingga biaya overhead pabrik. Sayangnya, akibat keterbatasan literasi keuangan, penentuan harga jual oleh sebagian besar mitra dampingan masih bersifat intuitif dan hanya didasarkan pada perkiraan kasat mata tanpa dasar kalkulasi ilmiah yang rigid.

Pemilihan Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, sebagai subjek pengabdian didasarkan pada potensi pertumbuhan ekonomi kawasannya yang ditandai oleh tumbuh suburnya berbagai unit usaha mikro dan industri rumahan. Namun, ekspansi kuantitas ini belum diimbangi oleh penguatan kualitas tata kelola manajerial yang memadai. Perubahan sosial yang diharapkan dari pelaksanaan program pendampingan ini adalah terjadinya transformasi perilaku akuntansi yang nyata di kalangan pelaku usaha. Melalui intervensi edukatif ini, komunitas dampingan diharapkan mampu bergeser dari model pengelolaan keuangan berbasis asumsi menuju praktik pencatatan keuangan akuntansi yang terstruktur, akurat, dan akuntabel.

Urgensi penguatan pemahaman HPP ini didukung kuat oleh literatur akuntansi biaya konvensional. Mulyadi (2018) menegaskan bahwa kalkulasi biaya produksi merupakan jangkar utama bagi manajemen untuk menetapkan harga jual yang rasional dan kompetitif. Kesalahan dalam mengidentifikasi komponen pengeluaran produksi dapat mengakibatkan fenomena *underpricing* (harga terlalu rendah yang menggerus profit) atau *overpricing* (harga terlalu tinggi yang mematikan daya saing produk di pasar). Sejalan dengan hal tersebut, Sujarweni (2015) mengemukakan bahwa akurasi pembukuan keuangan berbasis biaya riil bertindak sebagai instrumen

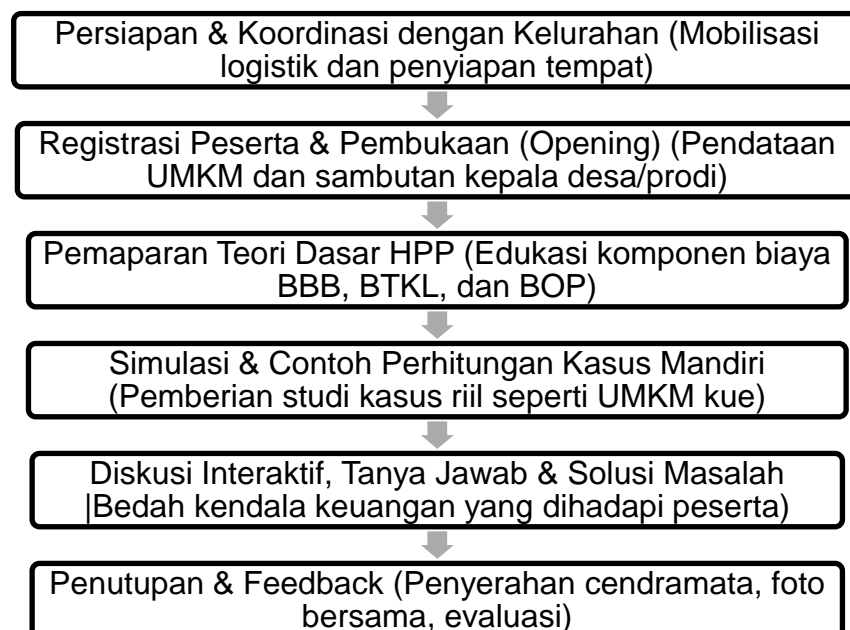
navigasi strategis yang memastikan kelayakan profitabilitas sebuah usaha untuk jangka panjang.

Di samping itu, kajian empiris dari Bahtiar (2017) dan Adi Prabowo (2019) membuktikan bahwa penerapan metode akuntansi biaya seperti *Full Costing*—yang memperhitungkan seluruh unsur biaya tetap dan variabel—memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan bagi usaha kecil. Dengan memiliki pemahaman mendalam mengenai struktur HPP, pelaku UMKM akan lebih tangguh dan fleksibel dalam mengantisipasi fluktuasi harga bahan baku di pasar tanpa harus mengorbankan kualitas produk mereka. Oleh karena itu, tim pengusul dari Program Studi S1 Akuntansi Institut Az Zuhra memandang program pendampingan klinis ini sebagai langkah krusial demi mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Desa Pandau Jaya.

Metode

Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan pengorganisasian komunitas partisipatif yang melibatkan civitas akademika Program Studi S1 Akuntansi Institut Az Zuhra bersama pelaku UMKM Desa Pandau Jaya. Subjek pengabdian adalah para pelaku usaha mikro di Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, dengan waktu pelaksanaan pada tanggal 26 Januari 2026.

Proses pengorganisasian dan perencanaan aksi bersama dilakukan melalui tahapan yang terstruktur demi memastikan keterlibatan aktif subjek dampingan sejak tahap registrasi hingga evaluasi balik (*feedback*). Tahapan pelaksanaan kegiatan secara visual digambarkan dalam diagram alir (*flowchart*) berikut:



Gambar 1. Tahapan pelaksanaan kegiatan secara visual

Diagram alir tersebut menggambarkan tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disusun secara sistematis dan kronologis. Kegiatan diawali dengan tahap persiapan dan koordinasi dengan pihak kelurahan, yang berfokus pada mobilisasi logistik serta penyiapan tempat acara agar seluruh sarana prasarana siap digunakan. Setelah lokasi siap, acara resmi dimulai dengan tahap registrasi peserta dan pembukaan (*opening*), yang diisi dengan pendataan pelaku UMKM yang hadir serta penyampaian kata sambutan dari perwakilan kepala desa dan ketua program studi sebagai bentuk legalitas dan penyambutan formal.

Memasuki inti acara, tim pelaksana melaksanakan tahap pemaparan teori dasar HPP untuk memberikan edukasi mendalam mengenai komponen-komponen pembentuk Harga Pokok Penjualan, yang meliputi Biaya Bahan Baku (BBB), Biaya Tenaga Kerja Langsung (BTKL), dan Biaya Overhead Pabrik (BOP). Teori dasar ini kemudian langsung diimplementasikan pada tahap simulasi dan contoh perhitungan kasus mandiri, di mana para peserta diajak mempraktikkan materi finansial tersebut menggunakan studi kasus riil yang kontekstual, seperti simulasi pada UMKM pembuatan kue kering.

Untuk memastikan terjadinya transfer pengetahuan yang efektif, kegiatan dilanjutkan dengan tahap diskusi interaktif, tanya jawab, dan solusi masalah guna membedah sekaligus menemukan jalan keluar atas kendala keuangan riil yang dihadapi oleh masing-masing peserta di lapangan. Rangkaian pengabdian ini akhirnya diakhiri dengan tahap penutupan dan *feedback*, yang ditandai dengan penyerahan cendramata sebagai bentuk apresiasi, sesi foto bersama untuk dokumentasi, serta pengumpulan lembar evaluasi guna mengukur tingkat keberhasilan dan kemanfaatan program bagi komunitas mitra.

Hasil

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diinisiasi oleh tim dosen Program Studi S1 Akuntansi Institut Az Zuhra—yang beranggotakan Nisa Alqorni, S.E, M.Ak., Nadia Triwahyuni, S.E., M.S.Ak., Desiyanti Rifayani, S.E., M.Acc., Ak., CA., Nuraini, S.E., M.Ak., Rinto Rahmad. M, S.E., M.Ak. CAP., dan Gazian Hazazi Nubli, S.E, M.Ak.—berjalan dengan sangat lancar dan mendapat antusiasme tinggi dari para pelaku usaha. Dinamika proses pendampingan diawali dengan pemetaan masalah keuangan kontekstual yang dihadapi oleh mitra di Desa Pandau Jaya. Ragam kegiatan yang dilaksanakan meliputi sosialisasi intensif mengenai klasifikasi biaya pokok dan pengenalan format pencatatan yang dimodifikasi agar mudah dipahami oleh masyarakat awam. Aksi program yang bersifat teknis ini berhasil mengurai bias informasi akuntansi yang selama ini dialami pelaku usaha, terutama dalam memisahkan pengeluaran operasional produksi dari pengeluaran konsumsi rumah tangga pribadi yang sering kali tercampur rata.

Guna memecahkan masalah komunitas secara konkret, tim pelaksana

memberikan tindakan klinis berupa simulasi perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) menggunakan studi kasus riil komoditas lokal, seperti usaha pembuatan kue kering. Peserta dibimbing secara langsung oleh narasumber untuk mengidentifikasi tiga elemen biaya utama, yaitu Biaya Bahan Baku (BBB), Biaya Tenaga Kerja Langsung (BTKL), dan Biaya Overhead Pabrik (BOP). Langkah ini diperkuat oleh perspektif teoretis dari Mulyadi (2018) mengenai pentingnya melacak seluruh komponen biaya produksi secara terperinci untuk mendapatkan nilai dasar produk yang akurat. Melalui latihan pengisian templat formulir HPP standar, peserta tidak lagi sekadar menebak pengeluaran, melainkan mampu mengalkulasi total biaya riil dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan guna menentukan harga pokok per unit secara matematis.

Lebih lanjut, pendampingan ini berhasil mendorong munculnya kesadaran baru dan transformasi perilaku di kalangan pelaku usaha terkait komponen biaya yang selama ini kerap diabaikan, khususnya Biaya Overhead Pabrik (BOP) seperti penyusutan alat cetak, oven, serta pemakaian listrik dan gas. Pendekatan kalkulasi menyeluruh yang diajarkan oleh tim dosen ini sejalan dengan metode *Full Costing* yang diulas oleh Bahtiar (2017), di mana pembebanan seluruh biaya produksi, baik yang bersifat tetap maupun variabel, menjadi prasyarat mutlak dalam menghasilkan informasi harga pokok yang valid. Perubahan cara pandang ini membuat para peserta menyadari bahwa kelalaian memasukkan unsur BOP ke dalam struktur harga jual secara tidak sadar telah menggerus margin keuntungan bersih yang seharusnya mereka terima untuk keberlanjutan usaha.

Transformasi sosial yang menjadi tujuan akhir dari kegiatan pengabdian ini mulai memperlihatkan dampak nyata dengan munculnya perubahan perilaku pasar yang lebih sehat serta lahirnya pemimpin lokal (*local leaders*) di antara sesama pelaku UMKM Desa Pandau Jaya. Beberapa pelaku usaha yang lebih cepat menguasai materi secara sukarela membentuk kelompok belajar mandiri untuk membantu pedagang lain yang masih mengalami kesulitan dalam pembukuan. Hal ini membuktikan bahwa edukasi penentuan harga jual yang ideal, sebagaimana ditegaskan oleh Sujarweni (2015), mampu mengoptimalkan profitabilitas internal bisnis. Dampak jangka panjangnya, sebagaimana dikemukakan oleh Adi Prabowo (2019), penguasaan kalkulasi HPP yang presisi ini memberikan keunggulan kompetitif bagi usaha mikro dalam menghadapi fluktuasi harga bahan baku di pasar, sekaligus menciptakan struktur ekonomi komunitas yang lebih tangguh dan mandiri.

Diskusi

Keberhasilan program pendampingan yang dilaksanakan oleh tim dosen Institut Az Zuhra di Desa Pandau Jaya memberikan konfirmasi nyata bahwa literasi keuangan, khususnya mengenai struktur biaya dasar, merupakan fondasi yang tidak dapat diabaikan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selama ini,

sebagian besar pelaku usaha mikro terjebak dalam bias kognitif yang menganggap bahwa penentuan harga pokok hanyalah fungsi dari akumulasi modal bahan baku yang tampak secara kasat mata. Kondisi empiris ini berakibat pada rentannya bisnis mereka terhadap risiko kerugian tersembunyi. Pengenalan formulasi akuntansi biaya yang aplikatif dalam kegiatan ini berhasil menjembatani kesenjangan teoretis akademis dengan realitas operasional yang dihadapi oleh komunitas mitra dampingan.

Melalui pendekatan klinis yang interaktif, diskursus mengenai pemisahan pos pengeluaran pribadi dan operasional usaha menjadi titik balik penting bagi kesadaran finansial peserta. Perspektif teoretis dari Mulyadi (2018) menegaskan bahwa akuntansi biaya sejatinya berfungsi untuk melacak, mencatat, dan mengalokasikan setiap sumber daya ekonomi yang dikorbankan dalam proses produksi secara sistematis. Dalam konteks UMKM Desa Pandau Jaya, implementasi teori ini membantu peserta memahami bahwa tenaga kerja mandiri yang mereka lakukan di dalam rumah serta penggunaan ruang domestik untuk aktivitas produksi tetap memiliki nilai ekonomi yang harus dikalkulasikan ke dalam harga produk demi mencerminkan pengorbanan modal yang sesungguhnya.

Lebih lanjut, perdebatan teoretis mengenai cakupan biaya diurai melalui pengenalan metode *Full Costing* yang diulas secara mendalam oleh Bahtiar (2017). Teori ini menyatakan bahwa untuk menghasilkan angka HPP yang valid, pelaku usaha wajib memasukkan seluruh elemen biaya produksi, baik yang bersifat variabel maupun biaya tetap, ke dalam kalkulasi akhir. Ketika para pelaku UMKM dibimbing untuk membedah Biaya Overhead Pabrik (BOP) seperti penyusutan alat masak, biaya pemakaian gas, hingga air bersih, ruang diskusi dipenuhi dengan refleksi kritis dari para peserta. Banyak di antara mereka menyadari bahwa pengabaian komponen BOP selama ini menjadi penyebab utama mengapa usaha mereka terkesan selalu berputar secara omzet namun tidak pernah menunjukkan pertumbuhan profitabilitas yang signifikan secara akumulatif.

Transformasi paradigma dari penentuan harga berbasis intuisi menjadi kalkulasi berbasis data akuntansi ini memiliki korelasi langsung terhadap penguatan profitabilitas internal bisnis. Sesuai dengan pemikiran Sujarweni (2015), ketepatan dalam menentukan harga jual yang ideal merupakan kunci utama guna memastikan bahwa margin keuntungan yang ditargetkan dapat menutup biaya operasional sekaligus menyisakan surplus untuk ekspansi usaha. Melalui forum diskusi ini, peserta dilatih untuk memproyeksikan laba secara rasional. Hasilnya, ketakutan pelaku usaha untuk menaikkan atau menyesuaikan harga jual menjadi berkurang setelah mereka mampu menyajikan argumentasi logis kepada konsumen bahwa harga yang ditetapkan telah didukung oleh kalkulasi kualitas dan komponen biaya produksi yang riil.

Secara makro, penguasaan materi HPP oleh komunitas dampingan di Desa

Pandau Jaya ini memberikan implikasi strategis terhadap daya saing pasar mereka di tingkat lokal maupun regional. Sebagaimana dikemukakan oleh Adi Prabowo (2019), akurasi penentuan harga pokok memberikan keunggulan kompetitif bagi usaha kecil, terutama dalam mengantisipasi dan menghadapi fluktuasi harga bahan baku di pasar yang sering kali tidak menentu. Dengan memiliki catatan HPP yang terstruktur, pelaku UMKM tidak akan mudah goyah atau ikut-ikutan melakukan perang harga yang tidak sehat. Sebaliknya, mereka memiliki fleksibilitas untuk melakukan efisiensi internal tanpa harus mengorbankan kualitas produk, yang pada akhirnya akan membentuk ekosistem ekonomi komunitas yang lebih tangguh, mandiri, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pendampingan penyusunan Harga Pokok Penjualan (HPP) di Desa Pandau Jaya telah berhasil merealisasikan seluruh target capaian edukasi dan penguatan kapasitas tata kelola keuangan mikro. Intervensi akademis yang dilakukan secara partisipatif oleh tim dosen akuntansi ini terbukti mampu mengurai hambatan mendasar pelaku usaha dalam memahami struktur pengeluaran riil mereka. Dengan runtuhnya bias estimasi harga yang sebelumnya hanya mengandalkan intuisi dagang, kini para pelaku UMKM memiliki instrumen kalkulasi yang valid untuk mengamankan margin keuntungan bersih. Keberhasilan tata laksana program ini menunjukkan bahwa transfer pengetahuan sains akuntansi yang dikemas secara sederhana dapat diadopsi dengan baik oleh masyarakat lapis bawah.

Refleksi teoretis dari hasil pengabdian ini memperkuat tesis bahwa penguasaan metode *Full Costing* bukan sekadar kebutuhan administratif perusahaan besar, melainkan urgensi vital bagi keberlangsungan usaha mikro. Ketika komponen Biaya Overhead Pabrik (BOP) seperti biaya penyusutan alat dan utilitas domestik mulai diintegrasikan ke dalam harga pokok produksi secara konsisten, pelaku usaha secara tidak langsung sedang membangun benteng pertahanan finansial yang kokoh. Kesadaran baru ini memicu transformasi perilaku akuntansi yang lebih sehat, di mana modal kerja tidak lagi terdistorsi oleh pengeluaran konsumsi pribadi. Dengan demikian, program ini berhasil membuktikan bahwa literasi akuntansi biaya adalah motor penggerak transformasi sosial dalam memutus rantai kerentanan ekonomi komunitas pedagang kecil.

Sebagai langkah taktis pasca-kegiatan, tim pengusul merumuskan beberapa rekomendasi utama guna menjaga keberlanjutan (*sustainability*) dari dampak positif yang telah tercipta. Rekomendasi pertama ditujukan kepada para pelaku UMKM mitra dampingan agar secara disiplin mengonsistensikan praktik pencatatan manual ke dalam buku kas harian usaha. Komitmen internal dari masing-masing pemilik usaha merupakan faktor penentu utama agar pengetahuan teknis yang telah diperoleh tidak menguap begitu saja. Di samping itu, para pengambil keputusan lokal atau tokoh UMKM yang telah terpilih sebagai *local leader* diharapkan dapat menginisiasi forum

diskusi berkala antarpedagang sebagai wadah saling mengoreksi pembukuan kas masing-masing.

Rekomendasi kedua diarahkan kepada pihak pemerintah Desa Pandau Jaya dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Az Zuhra untuk membangun sinergi kemitraan jangka panjang. Perangkat desa diharapkan dapat memfasilitasi legalitas dan pembentukan klaster kelompok usaha bersama demi mempermudah akses pasar serta pengawasan kolektif. Sementara itu, pihak akademisi perlu merancang program pendampingan lanjutan di masa mendatang yang berfokus pada digitalisasi pencatatan keuangan menggunakan aplikasi berbasis ponsel pintar (*smartphone*). Langkah digitalisasi ini menjadi fase krusial berikutnya agar laporan keuangan yang dihasilkan oleh UMKM di Desa Pandau Jaya tidak hanya akurat, tetapi juga memiliki tingkat akuntabilitas tinggi yang memenuhi syarat untuk mengakses pembiayaan lembaga keuangan formal.

Daftar Referensi

- Adi Prabowo, A. (2019). Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Berdasarkan Metode Harga Pokok Pesanan (*Job Order Costing*) Pada UD Adi Prima Karsa Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Bahtiar, F. (2017). Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Dengan Metode *Full Costing* Pada Usaha Kecil Dan Menengah UD. Dhipati Jaya. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Bisnis*, 6.
- Mulyadi. (2018). *Akuntansi Biaya* (Edisi 5, Cetakan 15). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada / Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Biaya Teori dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.